



ILMU PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Pertemuan-12

OLEH :

Drs. Rasudyn Ginting, MSi

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA JEPANG

Tujuan Instrusional Umum: Setelah mempelajari mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara mahasiswa dapat memahami latar belakang kelahiran studi perbandingan administrasi negara, tujuan perbandingan administrasi negara, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi perbandingan administrasi negara, dan beberapa sistem administrasi negara yang ada

Tujuan Instrusional Khusus: Mahasiswa dapat, mengidentifikasi bentuk negara Jepang, mengidentifikasi bentuk pemerintahan Jepang, mengidentifikasi sistem pemerintahan Jepang, mengidentifikasi infrastruktur politik yang mempengaruhi sistem administrasi Jepang, menghubungkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi sistem administrasi Negara, membedakan tugas house of representatives dengan house of councilors berdasarkan konstitusi 1947, menguraikan fungsi/tugas cabinet, menguraikan fungsi/tugas supreme of court, menjelaskan hubungan pemerintah pusat dengan daerah, menjelaskan kedudukan kaisar dalam pemerintahan, menjelaskan hubungan antara diet-kabinet-supreme of court-kaisar, menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA JEPANG

↳ Bentuk Negara : Kesatuan

↳ Bentuk Pemerintahan : Monarki Parlementer

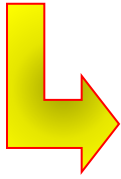
↳ Sistem Pemerintahan : Parlementer

↳ Sistem Politik :

↳ ❖ **Infrastruktur Politik :**

- ↳ ➤ **Partai Demokrat Liberal**
- ↳ ➤ **Partai Klub Liberal Baru**
- ↳ ➤ **Partai Sosialis Demokrat**





- **Partai Demokrat Sosial Bersatu**
- **Partai Sosialis (Nihon Shakaito)**
- **Partai Komunis (Nihon Kyosanto)**
- **Partai Pemerintahan Yang Bersih (Komeito)**
- **Pers**
- **Zaikai (Kelompok pengusaha besar)**
- **Keindanren (himpunan organisasi ekonomi)**
- **Organisasi Professi**



❖ Suprastruktur Politik:

1. Kaisar

2. Legislatif

✓ Sangiin (Majelis Tinggi)

✓ Shungiin (Majelis rendah)

3. Eksekutif

✓ Perdana Menteri

4. Yudikatif

✓ Supreme Court



Proses pemilihan pejabat negara dan mekanisme hubungan administratif

